

**TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT
PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PARE-PARE
(Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA. Pare)**



Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan Jurusan Peradilan
pada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar

Oleh

MUHAMMAD FAIZ
NIM. 10100113081

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR
2017**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FAIZ
Nim : 10100113081
Tempat /Tgl. Lahir : Pare-Pare, 04 Maret 1995
Jurusan : Peradilan Agama
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul : Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pare-Pare (Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA. Pare)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Pare-Pare (Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA. Pare)”** adalah benar hasil karya penyusun sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan (tanpa campur tangan penyusun), maka skripsi dan gelar yang diperoleh batal demi hukum.

Samata, 16 November 2017

Penyusun



MUHAMMAD FAIZ

Nim: 10100113081

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, "Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare (Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare)" yang disusun oleh Muhammad Faiz, NIM: 10100113081, mahasiswa prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada hari Kamis, 07 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1439 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Syariah dan Hukum, Jurusan Peradilan (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 19 Desember 2017 M.
30 Rabiul Awal 1439 H.

DEWAN PENGUJI:

Ketua : Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.

Sekretaris : Dr. H. Supardin, M.H.I.

Munaqisy I : Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.

Munaqisy II : Dr. Hj. Patimah, M.Ag.

Pembimbing I : Dra. Hj. Hartini, M.H.I.

Pembimbing II : Musyfikah Ilyas, S.H.I, M.H.I.

Disahkan oleh:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar,



Prof. Dr. Darussalam, M.Ag.
NIM 196210161990031003

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ
أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini sebagaimana mestinya.

Kebesaran jiwa dan kasih sayang yang tak bertepi, doa yang tidak terputus dari kedua orang tua saya yang tercinta, Drs. Abd. Rahim Gaffar dan Dra. Marham, yang senantiasa memberikan penulis curahan kasih sayang, nasihat, perhatian, semangat serta doa restu yang selalu diberikan sampai saat ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rahmayani Rahim dan Makhdariatul Musyfiyah, yaitu saudara saya yang tercinta serta keluarga besar penulis, terima kasih atas perhatian dan kasih sayangnya selama ini dan serta berbagai pihak yang tulus dan ikhlas memberikan andil sejak awal hingga usainya penulis menempuh pendidikan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Dalam menyusun skripsi ini tidak sedikit kekurangan dan kesulitan yang dialami oleh penulis, baik dalam kepustakaan, penelitian lapangan, maupun hal-hal lainnya. Tetapi berkat ketekunan, bimbingan, petunjuk serta bantuan dari

pihak lain akhirnya dapatlah disusun dan diselesaikan skripsi ini menurut kemampuan penulis. Kendatipun isinya mungkin terdapat banyak kekurangan dan kelemahan, baik mengenai materinya, bahasanya serta sistematikanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini disusun dan diselesaikan berkat petunjuk, bimbingan dan bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu, sudah pada tempatnyalah penulis mengucapkan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah rela memberikan, baik berupa moril maupun berupa materil dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini.

Penghargaan dan ucapan terima kasih yang terdalam dan tak terhingga terutama kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Musafir Pababbari, M.Si. selaku Rektor UIN Alauddin Makassar;
2. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar beserta jajarannya;
3. Bapak Dr. H. Supardin M.H.I. selaku Ketua Jurusan Peradilan Agama UIN Alauddin Makassar
4. Ibu Dr. Hj. Patimah, M.Ag. selaku Sekertaris Jurusan Peradilan Agama;
5. Ibu Dra. Hj. Hartini, M.H.I. selaku pembimbing I dan Ibu Musyfikah Ilyas, S.H.I, M.H.I. selaku pembimbing II. Kedua beliau, di tengah kesibukan dan aktifitasnya bersedia meluangkan waktu, tenaga dan

pikiran untuk memberikan petunjuk dan bimbingan dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini;

6. Bapak dan ibu dosen serta seluruh staf akademik dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar;
7. Semua instansi terkait dan responden yang telah bersedia membantu dan memberikan data kepada penulis, dan yang telah memberikan masukan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
8. Seluruh Sahabat-Sahabati PMII Kom. UIN Alauddin Makassar Cab. Makassar mulai dari jajaran Dewan Pembina, Dewan Senior, Pengurus Komisariat , pengurus-pengurus Rayon dan Sahabat Pencinta Alam (SPA) PMII KOM. UIN ALAUDDIN CAB. MAKASSAR terima kasih atas dukungan dan motivasinya selama ini;
9. Seluruh teman kuliah Jurusan Peradilan Agama Angkatan 2013 Khususnya Wahyudi Sahri, S.H, Muhammad Ikho Hasmunir, S.H, Muhammad Anhar, S.H, Muhammad Idham Dzulhaj, S.H, Muhammad Nur Ardiansyah, S.H. Ahmad Nur Syamsir, S.H, Muhammad Syahrul, Siti Wulandari, Suriyana S.H, Jumardin S.H, Suriyani Nur, S.H, Adnayan rahmawati, S.H, serta yang tak dapat saya sebutkan, terima kasih atas kesetiakawanan, dukungan dan motivasinya selama ini;
10. Seluruh teman KKN UIN Alauddin Makassar Angkatan 54 kecamatan Eremerasa, terkhusus Desa Kampala, Hidayatullah, Muhammad Arsan, Muliadi, Mitasari, Diana, Marwah, Rita, Nur Aini, Halijah;

11. Kepada seluruh keluarga besar saya yang tidak bosan memberikan bantuan, semangat kepada penulis sehingga dapat terselasaikan skripsi ini.

Atas segala bantuan, kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan bagi penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, Semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah swt.

Akhirnya dengan penuh rendah hati penulis mengharap tegur sapa manakala terdapat kekeliruan menuju kebenaran dengan mendahulukan ucapan terima kasih yang tak terhingga.

Makassar, 16 November 2017

Penulis

Muhammad Faiz

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN
MAKASSAR

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN TEORITIS	
A. Pengertian Harta bersama Dalam Perkawinan	9
1. Harta Bersama Menurut Hukum Adat	10
2. Harta Bersama Menurut Perundang-undangan	12
3. Harta bersama Menurut Hukum Islam	15
4. Pembagian Harta bersama	17
B. Macam-Macam Harta Bersama Dalam Perkawinan	18
C. Harta Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	21
D. Dasar Hukum Harta bersama Dalam Perkawinan	24
E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama	25
F. Ruang Lingkup Harta bersama Dalam Perkawinan	28
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	32
1. Jenis Penelitian	32

2. Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data	33
1. Data Primer (Utama)	33
2. Data Sekunder (Tambahan)	33
3. Data Tersier	34
D. Metode Pengumpulan Data	34
1. Wawancara	34
2. Observasi	35
3. Dokumentasi	36
E. Instrumen Penelitian	37
1. Pedoman Wawancara	37
2. Alat Tulis dan Buku Catatan	37
3. Handpone	38
F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	38
1. Analisis Kualitatif	38
2. Analisis Komparatif	38
G. Pengujian Keabsahan Data	38
BAB IV PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN	
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pare-Pare	40
B. Prosedur Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	45
C. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pembagian Harta Bersama No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare	48
D. Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian	65
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	67
B. Implikasi Penelitian	67
DAFTAR PUSTAKA	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	71

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrop terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka

ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	Ha
ء	hamzah	,	Apostop
ي	ya	y	Ye

Hamzah yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	i	I
	<i>Dammah</i>	u	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah dan ya	ai	a dan i
	fathah dan wau	au	a dan u

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>fathah dan alif atau ya</i>	a	a dan garis di atas
	<i>kasrah dan ya</i>	i	i dan garis di atas
	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, yang transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu transliterasinya dengan [h].

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Jika huruf ّ ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـِ), maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah*(i).

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf أ (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari al-Qur'an), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz a-ljalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama dari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (AL-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

NAMA : MUHAMMAD FAIZ

NIM : 10100113081

JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA
BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN
AGAMA PARE-PARE (Studi Putusan No.
254/Pdt.G/2014/PA.Pare)

Skripsi ini membahas tentang bagaimana tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Akibat adanya perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan. Hal itu berarti bahwa perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama. Pasca terjadinya perceraian, timbul perselisihan antara mantan suami dan mantan isteri mengenai permasalahan harta bersama yang tidak dapat dibagi secara damai dengan alasan salah satu pihak telah berselingkuh, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pare-Pare. Berlatar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti prosedur penyelesaian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare serta pertimbangan Hakim dalam putusan pembagian harta bersama akibat perceraian No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan atau *field research kualitatif* yang berlokasi di Pengadilan Agama Pare-Pare, jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi pustaka.

Hasil penelitian ini ialah prosedur penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama yang telah ditentukan, baik secara hukum formil maupun hukum materil. Di dalam proses persidangan pembagian harta bersama diawali dengan proses persidangan yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa yang terjadi di persidangan sehingga hakim dapat menemukan bukti-bukti atau fakta-fakta untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama, kemudian ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama harus mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya baik pada manusia hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki).¹

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 2, Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.³

Akibat dari adanya suatu perkawinan yang sah salah satunya adalah persatuan harta benda yang ada sejak setelah melakukan perkawinan tersebut. Hal

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 6.

²Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Cet. VII; Bandung: Citra Umbara, 2011), h. 2.

³Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008), h. 10.

itu berarti bahwa dengan perkawinan antara suami dengan istri, maka harta mereka dilebur menjadi satu. Dengan demikian di dalam suatu keluarga, terdapat satu kekayaan harta milik bersama atau yang sering disebut dengan harta bersama.⁴

Tidaklah mustahil jika dalam masyarakat dijumpai bahwa kehidupan perkawinan terkadang dengan suatu sebab atau beberapa sebab keadaan rumah tangganya menjadi buruk atau tidak harmonis lagi. Keadaan yang seperti itu menjadi alasan pokok setiap pasangan suami-isteri memutuskan untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dan memilih untuk melakukan perceraian.⁵

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian maupun atas putusan hakim. Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.⁶

Akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut :

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas isteri. Bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, kemudian

⁴J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Cet. 3; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 38.

⁵Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 29.

⁶Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 152.

memberikan nafkah selama masa iddah. Untuk bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Biaya hidup bagi bekas istri yang bersangkutan dengan syarat-syarat yang wajar. Jadi jangan bersifat uang penghibur tapi harus bersifat uang kewajiban.

2. Mengenai anak- anak Anak-anak yang masih dibawah umur 21 tahun maka berhak diasuh oleh ibunya. Dalam hal nafkah seorang ayah wajib memberikan nafkah untuk anaknya sampai anak itu menikah dan dapat hidup mandiri.
3. Mengenai harta benda. Dalam hal harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami isteri (syirkah) selama perkawinan menjadi milik bersama dari suami istri untuk kepentingan bersama. Karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau oleh perceraian, maka harta ini dibagi antara suami dan istri.⁷ Hal ini yang sering disebut dengan harta bersama.

Pasca terjadinya perceraian, timbul perselisihan antara mantan suami dan mantan isteri mengenai permasalahan harta bersama yang tidak dapat dibagi secara damai dengan alasan salah satu pihak telah berselingkuh, sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pare-Pare.

⁷Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia* (Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), h. 81-83.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik meneliti putusan pengadilan Agama Pare-pare dalam bentuk skripsi dengan judul tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-pare putusan no. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare. Penelitian ini dilakukan karena pentingnya penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian Dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari prosedur penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama.

2. Deskripsi Fokus

Adapun deskripsi fokus yakni sebagai berikut :

- a. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁸
- b. Yuridis adalah segala hal yang mempunyai arti hukum dan telah di sahkan oleh pemerintah.
- c. Harta bersama adalah harta benda atau hasil kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. II; Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012), h. 1470.

- d. Perceraian adalah cerai hidup atau perpisahan hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan peran masing-masing.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka masalah pokok adalah bagaimana tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare. Dari pokok masalah tersebut yang menjadi sub masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur penyelesaian terhadap pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare ?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan pembagian harta bersama akibat perceraian No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare ?

D. Kajian Pustaka

Pembahasan tentang pembagian harta bersama sudah banyak diteliti dan dikaji dalam berbagai bentuk karya tulis, baik dalam bentuk buku, skripsi atau lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang biasa dijadikan sebagai sumber informasi. Dari sekian banyak tentang sengketa harta bersama ada beberapa pembahasan yang berhubungan dengan pembahasan ini, antara lain :

Pertama, Rizka Magfirah N, “Tuntutan Pembagian Harta Bersama Yang Dalam Status Agunan (Studi Kasus Putusan No. 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks)”, skripsi ini membahas tentang penbagian harta bersama dalam status agunan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini mengenai harta bersama yang tidak dapat dibagi karena terdapat cacat hukum berdasarkan eksepsi di ajukan tergugat yaitu

adanya harta bersama yang masih dalam agunan bank dengan adanya pinjaman kredit sehingga harta bersama baru dapat dibagi secara nyata apabila telah terjadi pelunasan.⁹

Kedua, Rabiatul Adawiyah K, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)” skripsi ini membahas tentang kedudukan hukum harta bersama dan harta bawaan dalam penyelesaian sengketa percampuran harta bersama dan harta bawaan di Pengadilan Agama Makassar.¹⁰

Ketiga, Hasniah, “Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara No. 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)”, skripsi ini meneliti mengenai penyelesaian persengketaan harta bersama. Dan mengkritisi ketentuan yang di gunakan Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara No. 160/Pdt.G/2005/PA.Yk. tersebut. Skripsi ini menganalisis berdasarkan 3 asas-asas umum dalam hukum Islam.¹¹

Keempat, Agung Nugroho, “Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kebumen No. 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm”. skripsi ini membahas mengenai persengketaan harta bersama di Pengadilan Agama Kebumen. Bahwa terdapat perbedaan yang signifikan status harta dalam perkawinan. Ialah pertama pada poin

⁹Rizka Magfirah N, “*Tuntutan Pembagian Harta Bersama Yang Dalam Status Agunan (Studi Kasus Putusan No. 1323/Pdt.G/2011/PA.Mks)*”, skripsi. (Makassar : Fakultas Hukum UNHAS Makassar, 2013).

¹⁰Rabiatul Adawiyah K, “Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)”, skripsi. (Makassar : Fakultas Hukum UNHAS Makassar, 2014)

¹¹Hasniah. “*Penyelesaian Perselisihan Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kediri (Studi Putusan Perkara No. 136/Pdt.G/2007/PA.Kdr)*”, skripsi. (Yogyakarta : Fakultas Syariah UIN Kalijaga Yogyakarta, 2009).

awal dalam posita harta tersebut merupakan harta bersama dan pada poin berikutnya status harta bersama tersebut beralih menjadi harta bawaan di karenakan harta tersebut merupakan harta warisan orang tua pihak yang bersangkutan. Kemudian dalam menyelesaikan perkara tersebut majelis hakim menggunakan dasar hukum sesuai dengan KHI Pasal 97.¹²

Kelima, M Sapuan, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)”. skripsi ini membahas tentang pembagian harta bersama ditinjau dari sudut hukum Islam. Adapun pembahasan dalam skripsi ini mengenai alasan dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹³

Adapun kaitannya dengan penelitian yang penulis bahas adalah sama-sama mengulas tentang pembagian harta bersama. Karena kasus tentang pembagian harta bersama masih menjadi pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, peneliti ingin mengkaji kembali mengenai hal tersebut.

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui prosedur penyelesaian pembagian harta bersama akibat perceraian.

¹²Agung Nugroho, “Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Kebumen No. 13/Pdt.G/2005/PA.Kbm”. skripsi (Yogyakarta : Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008).

¹³M Sapuan, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Sengketa Harta Bersama (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 160/Pdt.G/2005/PA.Yk)”, skripsi (Yogyakarta : Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009).

- b. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam putusan pembagian harta bersama akibat perceraian.

2. Manfaat penelitian

- a. Dalam bidang akademik diharapkan penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang hukum Islam dan hukum positif dengan adanya data-data yang menunjukkan tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian.
- b. Bidang akademik penelitian ini merupakan syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dalam bidang hukum Islam.
- c. Bagi masyarakat luas penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta pengetahuan tentang pembagian harta bersama jika terjadi perceraian, sehingga memberikan penanganan terhadap masalah tersebut.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Pengertian Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.¹

Secara etimologis dalam kamus umum bahasa indonesia, harta bersama terdiri dari dua kata yaitu harta dan bersama.² Harta adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan. Sedangkan bersama adalah seharga, semilik. Selanjutnya mengenai pengertian harta bersama secara terminologis adalah barang-barang, uang dan sebagainya yang menjadi kekayaan yang diperoleh suami istri secara berasama-sama dalam perkawinan.³

Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama.

Dalam kitab-kitab fiqh tidak dikenal adanya pembauran harta suami istri setelah berlangsungnya perkawinan. Suami memiliki hartanya sendiri dan istri memiliki hartanya sendiri. Sebagai kewajibannya, suami memberikan sebagian hartanya itu kepada istrinya atas nama *nafaqah*, yang untuk selanjutnya digunakan istri bagi keperluan rumah tangganya. Tidak ada penggabungan harta, kecuali

¹Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Cet. 4; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 200.

²Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 347.

³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 52.

dalam bentuk *syirkah*. Tanpa akad tersebut harta tetap terpisah.⁴

Hukum Islam Hanya mengenal *syirkah*. Harta bersama dalam perkawinan termasuk *syirkah abdan mufawwadah*, dikatakan *syirkah afdan* karena suami istri secara bersama-sama bekerja membanting tulang dalam mencari nafkah sehari-hari. Dikatakan *syirkah mufawwadah* karena perkongsian antara suami istri itu tidak terbatas.⁵

1. Harta Bersama Menurut Hukum Adat

Indonesia yang mempunyai daerah yang sangat luas, memberikan adanya perbedaan nama dan istilah terhadap penamaan harta bersama sesuai dengan bahasa dan dialek daerah tertentu. Hal ini bisa dilihat di daerah Jawa disebut *gono gini*, di Aceh disebut harta *seuhareukat*, di Bali disebut harta *druwe*, di Minangkabau disebut harta *suarang*, di Madura disebut *ghuma-ghuma*, dan di Sulawesi Selatan disebut barang *cakkara*.⁶

Secara umum, hukum adat tentang harta gono gini hampir sama di seluruh daerah. Yang dapat dianggap sama adalah perihal terbatasnya harta kekayaan yang menjadi harta bersama (harta persatuan), sedangkan mengenai hal-hal lainnya, terutama mengenai kelanjutan dari harta kesatuan itu sendiri pada kenyataannya memang berbeda di masing-masing daerah.

Pembagian harta bersama pada masyarakat adat bugis bila terjadi perceraian, maka harta bersama tersebut tidak dibagi dua melainkan berdasarkan

⁴Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016), h. 98.

⁵Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 154.

⁶Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia* (Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008), h. 107.

siapa yang lebih banyak mencari nafkah diantara kedua belah pihak, dimana pada umumnya laki-laki (suami) lebih banyak mendapatkan harta bersama dibandingkan pihak istri. Hal ini disebabkan laki-laki pada masyarakat adat bugis dipandang sebagai pemikul dan perempuan menjunjung “*buraknea a’lembarak, bainea a’junjung*” dan ketentuan hukum adat bugis diyakini tidak bertentangan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.⁷ Di Jawa, pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan harta gono-gini setelah terjadi perceraian antara suami dan istri akan bermakna penting sekali. Hal ini berbeda sekali dengan kondisi dari salah satu keduanya meninggal dunia, pembagian tersebut tidak begitu penting. Sementara itu, di Aceh pembagian harta kekayaan kepada harta bawaan dan *hareuta sauhareukat* bermakna sangat penting baik ketika terjadi perceraian maupun pada saat pembagian warisan jika salah seorang pasangan meninggal dunia.

Meskipun pembagian harta bersama di berbagai daerah boleh dikatakan hampir sama, tetapi ada juga yang dibedakan berdasarkan konteks budaya lokal masyarakatnya. Salah satu contoh dimana hukum adat yang cenderung tidak memberlakukan konsep harta gono-gini, yaitu di daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut hukum adat Lombok, perempuan yang bercerai pulang kerumah orang tuanya dengan hanya membawa anak dan barang seadanya, tanpa mendapat hak gono-gini.

Menurut M. Yahya Harahap jika ditinjau historis terbentuknya harta bersama, telah terjadi perkembangan hukum adat terhadap harta bersama

⁷Jurnal.untan.ac.id diakses pada tanggal 7 September 2017.

didasarkan pada syarat ikut sertanya istri secara aktif dalam membantu pekerjaan suami. Jika istri tidak ikut secara fisik dan membantu suami dalam mencari harta benda, maka hukum adat lama menganggap tidak pernah terbentuk harta bersama dalam perkawinan. Dalam perjalanan sejarah lebih lanjut, pendapat tersebut mendapat kritik keras dari berbagai kalangan ahli hukum sejalan dengan berkembangnya pandangan emansipasi wanita dan arus globalisasi segala bidang.⁸

2. Harta bersama Menurut Perundang-undangan

Dalam Pasal 119 KUH Perdata dikemukakan bahwa sejak saat di langsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta Bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami isteri. Jika bermaksud mengadakan penyimpangan dari ketentuan itu, suami isteri harus menempuh jalan dengan perjanjian kawin yang diatur dalam Pasal 139 sampai Pasal 154 KUH Perdata.

Dalam Pasal 128 sampai Pasal 129 KUH Perdata, dinyatakan bahwa apabila putusanya tali perkawinan antara suami isteri, maka harta bersama itu dibagi dua antar suami isteri tanpa memperhatikan dari pihak mana barang-barang kekayaan itu sebelumnya diperoleh. Tentang perjanjian kawin itu dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan sepanjang tidak menyalahi tata susila dan ketenteraman umum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 107-108.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37, dikemukakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Masing-masing suami istri terhadap harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah pengawasan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atas harta bersama itu atas persetujuan kedua belah pihak. Dinyatakan pula bahwa suami atau istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bersama tersebut apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama tersebut diatur menurut hukum masing-masing.

Menurut Pasal 36 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 87 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bahwa istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum terhadap harta pribadi masing-masing. Mereka bebas menentukan terhadap harta tersebut tanpa ikut campur suami atau istri untuk menjualnya, dihibahkan, atau diagunkan. Juga tidak diperlukan bantuan hukum dari suami untuk melakukan tindakan hukum atas harta pribadinya. Tidak ada perbedaan kemampuan hukum antara suami istri dalam menguasai dan melakukan tindakan terhadap harta pribadi mereka. Ketentuan ini bisa dilihat dalam Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam, di mana ditegaskan bahwa tidak ada percampuran antara harta pribadi suami istri karena perkawinan dan harta istri tetap mutlak jadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, begitu juga harta pribadi suami menjadi hak mutlak dan dikuasai penuh olehnya.

Mengenai wujud harta pribadi itu sejalan dengan apa yang telah dijelaskan dalam Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan ini sepanjang suami istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (*hewelijke voorwaarden*) sebelum akad nikah dilaksanakan. Adapun harta yang menjadi milik pribadi suami atau istri adalah (1) harta bawaan, yaitu harta yang sudah ada sebelum perkawinan mereka laksanakan, (2) harta yang diperoleh masing-masing selama perkawinan tetapi terbatas pada perolehan yang berbentuk hadiah, hibah, dan warisan. Di luar jenis ini semua harta langsung masuk menjadi harta bersama dalam perkawinan.

Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama, baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga dengan harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama, tidak menjadi soal apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau juga tidak menjadi masalah atas nama siapa harta itu didaftarkan.⁹

Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 37 telah disebutkan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta benda diatur menurut hukumnya masing-masing. Yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. dalam Undang-Undang perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian

⁹Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 109.

masing-masing dari suami istri terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam Undang-Undang perkawinan ini rupanya hanya memberikan kelonggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama tersebut dan jika ternyata tidak ada kesepakatan, maka hakim dapat mempertimbangkan menurut rasa keadilan yang sewajarnya.¹⁰

3. **Harta Bersama Menurut Hukum Islam**

Konsep harta gono-gini memang dikenal dalam tradisi masyarakat Indonesia, konsep ini merupakan bagian dari warisan berbagai macam tradisi yang ada di tanah air. Meskipun demikian ternyata konsep harta gono-gini itu ada dalam hukum Islam.¹¹

Dalam penyelesaian harta bersama di dalam hukum Islam diakui adanya harta yang merupakan hak milik bagi setiap orang, baik mengenai pengurusan dan penggunaannya maupun untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum atas harta tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan syariat islam. Di samping itu juga di beri kemungkinan adanya suatu serikat kerja antara suami istri dalam mencari harta kekayaan. Oleh karena itu jika terjadi perceraian antara suami istri tersebut dibagi menurut hukum Islam yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa tidak ada kemudharatan dan tidak boleh memudharatkan, dari kaidah hukum ini jalan terbaik untuk menyelesaikan harta bersama adalah dengan membagi harta tersebut secara adil. Dan dalam prakteknya bila terjadi perceraian diantara suami istri

¹⁰Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Cet. 1; Bandung: Mandar Maju, 1990), h.189.

¹¹Happy Susanto, *Pembagian Harta Gono-Gini* (Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2008), h. 50.

biasanya harta bersama dibagi dua dengan pembagian yang sama rata, hal ini dapat dilihat di mana Mahkamah Agung dalam putusan-putusannya dalam pemeriksaan kasasi selalu menentukan bahwa pembagian secara 50:50 atau setengah-setengah.¹²

Dalam kitab-kitab fiqih, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami isteri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan kata lain disebutkan bahwa harta bersama adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami isteri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi. Berdasarkan firman Allah swt.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. (QS. An-Nisa Ayat 32)¹³

Hukum Islam juga berpendirian bahwa harta yang diperoleh suami selama perkawinan menjadi hak suami, sedangkan istri hanya berhak terhadap nafkah

¹²Bahder Johan Nasution dan Sri Warjiyati, *Hukum Perdata Islam* (Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 34.

¹³Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: Syaamil Quran).

yang diberikan suami kepadanya. Namun Al-Quran dan Hadits tidak memberikan ketentuan yang tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama berlangsung perkawinan sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suaminya. Al-Qur'an dan hadits juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, maka secara langsung istri juga berhak terhadap harta tersebut.

Sebagian pendapat para pakar hukum Islam mengatakan bahwa agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an. Pendapat ini dikemukakan oleh Hazairin, Anwar Harjono, dan Andoerraoef, serta diikuti oleh murid-muridnya. Sebagian pakar hukum Islam yang lain mengatakan bahwa suatu hal yang tidak mungkin jika agama Islam tidak mengatur tentang harta bersama ini, sedangkan hal-hal lain yang kecil-kecil saja diatur secara rinci oleh agama Islam dan ditentukan kadar hukumnya. Jika tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, maka ketentuan itu diatur dalam Hadist yang juga merupakan salah satu sumber hukum Islam juga.¹⁴

4. **Pembagian Harta Bersama**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 37 menyatakan bahwa "Bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing." Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa yang diatur adalah hukum agama, hukum adat, dan hukum-hukum lain.

¹⁴Abdul Manan, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. 109.

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak menyatakan dengan tegas berapa bagian masing-masing antar suami atau istri, baik cerai mati maupun cerai hidup. Tetapi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 96 dan Pasal 97 mengatur tentang pembagian syirkah ini baik cerai hidup maupun cerai mati, yaitu masing-masing mendapat setengah dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Selengkapnya lihat bunyi Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam:

- a. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
- b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Sedangkan Pasal 97 menyatakan bahwa “Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

B. *Macam-Macam Harta Bersama Dalam Perkawinan*

Kompilasi hukum Islam Pasal 91 menyatakan bahwa wujud harta bersama itu antara lain :

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 dapat berupa benda terwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.

3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.¹⁵

Sementara Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam berbunyi “suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama”.

Sayuti Thalib berpendapat bahwa harta bersama dibagi dalam tiga kelompok yaitu:¹⁶

1. Dilihat dari sudut asal asul harta suami istri itu dapat di golongan pada 3 golongan yaitu:
 - a. Harta masing-masing suami atau istri yang di dapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri.
 - b. Harta yang di peroleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing.
 - c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.
2. Dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:

¹⁵ Abdul Manan dan M. Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama* (Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 75.

¹⁶ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Cet. 1; Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974), h. 83.

- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak-anak.
 - b. Harta kekayaan yang lain.
3. Dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:
- a. Harta milik bersama.
 - b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga.
 - c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.

Mengenai harta kekayaan yang didapat sepanjang perkawinan inilah yang akan dibagi jika perkawinan itu putus, baik secara perceraian, kematian ataupun putusan pengadilan.

Pentingnya ditetapkan harta bersama dalam suatu perkawinan adalah untuk penguasaan dan pembagiannya, penguasaan terhadap harta bersama dalam hal perkawinan masih berlangsung, pembagian harta bersama dilakukan ketika terjadi putusnya perkawinan.

Harta bersama atau gono gini ini diatur secara seimbang dalam artian, suami atau istri menguasai harta secara bersama-sama, masing-masing pihak bertindak atas harta tersebut dengan persetujuan pihak lain dan jika perkawinan putus maka menurut Kompilasi Hukum Islam harta itu akan dibagi sama banyak antara suami dan istri.

C. Harta Dalam Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam

(Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam)

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

(Pasal 86 Kompilasi Hukum Islam)

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

(Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam)

1. Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sedekah, atau lainnya.

(Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam)

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada pengadilan Agama.

(Pasal 89 Kompilasi Hukum Islam)

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri, maupun hartanya sendiri.

(Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam)

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

(Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam)

5. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda terwujud atau tidak berwujud.
6. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
7. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
8. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

(Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam)

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

(Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam)

1. Pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta bersama tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.

(Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam)

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga, atau yang keempat.

(Pasal 95 Kompilasi Hukum Islam)

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dilakukan penjualan atas harta bersama untuk kepentingan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

(Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam)

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama.
2. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

(Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam)

Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

D. Dasar Hukum Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. UU Perkawinan Pasal 35 ayat 1, disebutkan bahwa yang di maksud dengan harta gono gini (harta bersama) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan artinya, harta kekayaan yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan tidak disebut harta gono-gini.
2. KUH Perdata pasal 119, disebutkan bahwa sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, sejauh tentang hal ini tidak diadakan ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami istri.
3. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 85, disebutkan bahwa adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal ini sudah menyebutkan adanya harta gono gini dalam perkawinan. Dengan kata lain, KHI mendukung adanya persatuan harta dalam perkawinan (gono gini). Meskipun sudah bersatu, tidak menutup kemungkinan adanya sejumlah harta milik masing masing pasangan, baik suami ataupun istri.
4. Pada KHI Pasal 86 ayat 1 dan ayat 2, kembali dinyatakan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena

ada perkawinan (ayat 1). Pada ayat 2 lebih lanjut ditegaskan bahwa pada dasarnya harta istri menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya. Demikian juga sebaliknya harta suami akan menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

E. Hak dan Tanggung Jawab Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Ketentuan tentang harta bersama yaitu pasal 35 sampai 37 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 85 sampai dengan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri antara mereka sendiri ataupun terhadap pihak ketiga. Tanggung jawab dalam lingkup suami istri adalah berkaitan dengan pemeliharaan harta bersama. KHI menjelaskan bahwa suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun hartanya sendiri. Istri juga turut bertanggung jawab terhadap harta bersama, maupun harta suami yang ada padanya.

Dari ketentuan tersebut, dapat dimengerti bahwa suami istri mempunyai tanggung jawab bersama dalam dalam pemeliharaan harta bersama. Hal ini semata dimaksudkan sebagai perwujudan penegakan kehidupan keluarga menuju kehidupan sejahtera dan bahagia.

Tanggung Jawab suami istri terhadap pihak ketiga adalah berkaitan dengan penggunaan harta perkawinan. Dalam penggunaan harta perkawinan tersebut dimungkinkan terhadap utang, baik utang bersama maupun utang pribadi. Problem yang muncul kemudian adalah tanggung jawab terhadap utang tersebut. Untuk mempertegas pembahasan mengenai utang dalam perkawinan, lebih dahulu

perlu dipahami makna utang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun utang bersama selama perkawinan.

Utang bersama merupakan semua utang-utang atau pengeluaran-pengeluaran yang dibuat, baik oleh suami ataupun istri atau bersama-sama, untuk kebutuhan keluarga mereka, kebutuhan untuk mereka bersama, termasuk pengeluaran sehari-hari. Sedangkan utang pribadi merupakan utang-utang yang dibuat suami ataupun istri untuk kepentingan pribadi mereka, yang bukan merupakan pengeluaran sehari-hari atau pengeluaran untuk kepentingan harta pribadi mereka masing-masing.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, perihal tanggung jawab utang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antar lain bahwa utang-utang yang membebani dari masing-masing sebelum perkawinan, utang-utang yang dibuat oleh suami istri untuk keperluan pribadinya dan utang-utang sesudah adanya perceraian. Utang pribadi suami istri tersebut dibayar dengan menggunakan harta pribadi masing-masing. Hal ini dipertegas dengan ketentuan pasal 93 ayat (1) KHI bahwa “pertanggung jawaban terhadap utang suami atau istri dibebankan kepada hartanya masing-masing”.

Mengacu pada perolehan harta bersama yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, maka suami istri dalam problematika utang bersama mempunyai tanggung jawab terhadap utang bersama dalam rangka membiayai pengeluaran bersama dalam keluarga. Pengeluaran bersama adalah pengeluaran yang diperlukan untuk kehidupan keluarga yang bersangkutan termasuk

¹⁷J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan* (Cet. 3; Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), h. 74-75.

didalamnya pengeluaran kebutuhan sehari-hari, pengeluaran untuk kesehatan dan pengobatan serta pendidikan anak-anak. Dengan demikian, harta bersama menanggung utang bersama. Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa apabila harta bersama tidak memadai untuk menutup tanggungan utang bersama maka dapat diambil dari harta pribadi suami. Apabila harta suami tidak mencukupi, dibebankan pada harta pribadi istri.

Kewajiban suami mempergunakan harta pribadinya untuk menutup utang bersama sebelum mempergunakan harta pribadi istri dalam hal tidak mencukupinya harta bersama, menurut penulis adalah terkait dengan kedudukan suami sebagai kepala keluarga. Dengan kedudukan tersebut, suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Artinya suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan istri dan anak, dan biaya pendidikan bagi anak.

Oleh karena itu, adalah wajar apabila KHI Menentukan bahwa apabila pelunasan utang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup maka diambil dari harta pribadi suami. Dengan kata lain bahwa prioritas utama untuk menutup utang bersama setelah dipergunakan harta bersama dibebankan kepada harta pribadi suami.

Akan tetapi, mengingat harta bersama pada dasarnya merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan sedangkan kedudukan suami istri berimbang dalam suatu perkawinan baik hak maupun tanggung jawabnya maka

suami istri mempunyai andil yang sama atas harta bersama. Hal ini dimaksudkan agar kehidupan rumah tangga dapat kokoh.

F. Ruang Lingkup Harta Bersama Dalam Perkawinan

Harta bersama merupakan konsekuensi hukum dari perkawinan. Menurut Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Ini berarti harta bersama mutlak ada dan tidak boleh ditiadakan oleh para pihak.

Ruang lingkup harta bersama dalam perkawinan, yaitu:

1. Semua harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama perkawinan, sekalipun harta atau barang terdaftar diatas namakan salah seorang suami istri, maka harta yang atas suami istri itu dianggap harta bersama.
2. Kalau harta itu dipelihara/diusahai dan telah dialihnamakan ke atas nama adik suami, jika harta yang demikian dapat dibuktikan hasil yang diperoleh selama masa perkawinan, maka harta tersebut harus dianggap harta bersama suami istri.
3. Adanya harta bersama suami istri tidak memerlukan pembuktian, bahwa istri harus ikut aktif membantu terwujudnya harta bersama tersebut, kecuali si suami dapat membuktikan bahwa istrinya benar-benar tidak melaksanakan kewajiban yang semestinya sebagai ibu rumah tangga yang selalu pergi meninggalkan rumah tempat kediaman tanpa alasan yang sah dan wajar.
4. Harta atau rumah yang dibangun atau dibeli sesudah terjadi perceraian dianggap harta bersama suami istri jika biaya pembangunan atau

pembelian sesuatu barang tersebut diperoleh dari hasil usaha bersama selama perkawinan.

5. Harta yang dibeli baik oleh suami maupun istri d tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah harta bersama suami istri, jika pembelian itu dilakukan selama perkawinan.
6. Barang termasuk harta bersama suami istri:
 - a. Segala penghasilan harta bersama yang diperoleh selama perkawinan termasuk penghasilan yang berasal dari barang asal bawaan maupun barang yang dihasilkan oleh harta bersama itu sendiri.
 - b. Demikian juga segala penghasilan pribadi suami istri baik dari keuntungan yang diperoleh dari perdagangan masing-masing pribadi sebagai pegawai.

Hal tersebut diatas sepanjang, mengenai hasil yang berasal dari keuntungan milik pribadi tidak dengan sendirinya menurut hukum termasuk harta bersama, kecuali hal itu telah diperjanjikan dengan tegas.

Adapun mengenai harta bersama apabila si suami kawin poligami, baik dua atau tiga istri, maka penuntutan harta bersama dapat diambil garis pemisah yaitu:

1. Segala harta yang telah ada antara suami dengan istri pertama sebelum perkawinannya dengan istri kedua, maka istri kedua tidak mempunyai hak apa-apa atas harta tersebut.
2. Oleh sebab itu, harta yang ada antar suami dan istri kedua, ialah hukum yang diperoleh kemudian setelah perkawinan. Jadi harta yang telah ada

diantara istri pertama dengan suami, adalah harta bersama yang menjadi hak mutlak antar istri pertama dengan suami, dimana istri kedua terpisah dan tidak mempunyai hak menikmati dan memiliki atasnya. Istri kedua baru ikut dalam lembaga harta bersama dalam kehidupan keluarga tersebut ialah harta kekayaan yang diperoleh terhitung sejak istri kedua itu resmi sebagai istri.

3. Atau jika kehidupan mereka terpisah, dalam arti istri pertama dengan suaminya hidup dalam satu rumah kediaman yang berdiri sendiri, demikian juga istri kedua yang terpisah hidup dalam rumah tangga sendiri dengan suami, apa yang menjadi harta istri pertama dengan suami dalam kehidupan rumah tangga menjadi harta bersama antara istri pertama dengan suami, dan demikian juga apa yang menjadi harta kekayaan dalam rumah tangga istri kedua dengan suami menjadi harta bersama antara istri kedua dengan suami.
4. Lain pula halnya jika seorang suami meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia mereka telah mempunyai harta bersama, kemudian istri kawin lagi dengan laki-laki lain, maka dalam keadaan seperti inipun tetap terpisah antara harta bersama milik suami yang telah meninggal dengan istri tadi yang akan diwarisi oleh keturunan-keturunan mereka, dan tidak ada hak anak/ keturunan yang lahir dari perkawinan istri tadi dengan suami yang kedua itu. Tetapi anak-anak dari dari perkawinan yang pertama mempunyai hak sebagai ahli waris dari harta bersama dari perkawinan yang kedua. Demikian juga sebaliknya jika istri yang meninggal, maka

harta bersama yang mereka peroleh terpisah dari harta yang diperoleh kemudian setelah perkawinannya dengan istri kedua tersebut.¹⁸



¹⁸Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Cet. I; Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), h. 119-122.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah *field research* yaitu penulis langsung turun ke lapangan untuk meneliti hal-hal yang menjadi pokok masalah tersebut. Penulis juga menggunakan metode kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi dan objek penelitian ini adalah dilakukan di Kota Pare-Pare dengan objek penelitian Pengadilan Agama Pare-Pare, untuk memperoleh informasi dan data mengenai proses penyelesaian perkara pembagian harta bersama dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama dan yang terpenting adalah mendapatkan informasi atau data yang akurat mengenai tinjauan yuridis pembagian harta bersama akibat perceraian.

B. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis. Menurut harfiahnya pendekatan yuridis adalah melihat atau memandang suatu hal yang ada dari aspek atau segi hukumnya terutama peraturan perundang-undangan. Sedangkan

pendekatan sosiologis adalah sesuatu yang ada dan terjadi dalam kehidupan bermasyarakat yang mempunyai akibat hukum.

Dengan demikian yuridis sosiologis adalah suatu pendekatan dengan cara pandang dari aspek hukum mengenai segala sesuatu yang terjadi di masyarakat yang berakibat hukum untuk dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Data Primer (utama)

Sumber data primer yaitu bahan yang sifatnya mengikat dan mendasari bahan hukum lainnya, diantaranya adalah :

- a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b) Kompilasi Hukum Islam.

2. Data Sekunder (tambahan)

Sumber data sekunder adalah sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan mengenai sumber data primer. Adapun sumber data sekunder terdiri dari :

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan hukum perdata dan hukum acara perdata.
- b) Literatur, dokumen, makalah-makalah, dan hasil riset yang relevan serta fakta-fakta lapangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Data Tersier.

Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

D. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Wawancara

Wawancara menurut Black dan champion dalam muslimina adalah teknik penelitian yang paling sosiologis dari semula teknik penelitian sosial. Wawancara ialah alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data jenis wawancara tidak terstruktur yaitu memberi peluang kepada peneliti untuk mengembangkan pertanyaan-pertanyaan penelitian.¹ Bentuk wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terbuka yaitu wawancara yang dilakukan peneliti dengan mengajukan pertanyaan pertanyaan yang tidak dibatasi jawabannya, dalam artian pertanyaan yang mengundang jawaban terbuka.² Hal yang sama juga disampaikan oleh koentjaraningrat (1986:136) bahwa wawancara terbuka atau *open interview* adalah jawaban yang dikehendaki tidak terbatas maka wawancara tersebut merupakan

¹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi* (Cet 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009), h.179-180

²Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data* (Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 51.

bentuk wawancara terbuka.³ Dalam hal ini peneliti menggunakan metode wawancara yang ditujukan kepada pejabat di lingkungan Pengadilan Agama Pare-Pare.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis. Pengamatan dapat dilakukan secara terlibat (partisipatif) ataupun non partisipatif. Maksudnya, pengamatan terlibat merupakan jenis pengamatan yang melibatkan peneliti dalam kegiatan orang yang menjadi sasaran penelitian, tanpa melibatkan perubahan pada kegiatan atau aktivitas yang bersangkutan dan tentu saja dalam hal ini peneliti tidak menutupi dirinya selaku peneliti.⁴ Menurut Tan dan Alfian cara penelitian yang mengandalkan metode observasi sangat penting.⁵

Menurut Patton observasi ialah deskripsi kerja lapangan kegiatan, perilaku, tindakan, percakapan, interaksi, inter personal, organisasi atau proses masyarakat, atau aspek lain dari pengalaman manusia yang dapat dialami.⁶ Observasi dapat pula diartikan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti mengenai fenomena objek penelitian diikuti dengan pencatatan sistematis terhadap semua gejala yang akan diteliti, observasi tidak hanya terbatas pada orang, tetapi juga objek-objek yang lain.

³Burhan Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Varian Kontemporer* (Cet. 10; Jakarta: Rajawali Pers, 2015), h. 100.

⁴Muhammad Idrus, *Metode Penelitian Ilmu Sosial* (Cet. I; Yogyakarta : Erlangga, 2009), h. 101.

⁵Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, h.173.

⁶Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, h. 65.

Dari segi jenisnya observasi terbagi menjadi observasi langsung yaitu observasi yang dilakukan dimana observer berada bersama objek yang di selidiki. Observasi tidak langsung yaitu observasi yang dilakukan tidak saat berlangsungnya suatu peristiwa yang akan diteliti, misalnya melalui film, foto atau tayangan slide.⁷ Dari segi prosesnya observasi dapat dibedakan menjadi observasi partisipan yaitu observasi yang dilakukan oleh peneliti dan berperan sebagai anggota didalam masyarakat topik penelitian, dan observasi non partisipan yaitu observasi yang menjadi peneliti sebagai penonton atau penyaksi terhadap gejala atau kejadian yang menjadi topik penelitian⁸, dan dari segi instrumentasi yang digunakan maka dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur (dirancang sistematis) yaitu observasi yang diselenggarakan dengan menentukan cara-cara sistematis, faktor-faktor yang akan diobservasi lengkap dengan kategorinya dan observasi tidak terstruktur (tidak dipersiapkan secara sistematis) yaitu observasi yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempersiapkan dan membatasi kerangka yang akan diamati.⁹

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, atau karya-karya yang monumental.¹⁰ Dokumen yang berbentuk tulisan seperti peraturan, kebijakan, dan lain-lain. Dokumen yang

⁷Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, h.173.

⁸Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, h. 39-40.

⁹Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, h.176.

¹⁰J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Cet. 13; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 60.

berbentuk gambar seperti foto, video dan lain sebagainya. Teknik pengumpulan data dengan dokumen adalah merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.¹¹

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Hal senada juga diungkapkan oleh S. Margono yang menyatakan bahwa pada umumnya penelitian akan berhasil apabila banyak menggunakan instrumen, sebab data yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian dan menguji hipotesis diperoleh melalui instrumen.¹²

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Adapun alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara yaitu alat yang digunakan dalam wawancara yang dijadikan dasar untuk memperoleh informasi dari informan yang berupa pertanyaan.

2. Alat tulis dan buku catatan

Berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data.¹³

¹¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*, h. 37.

¹²Nurul Zuriah, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*, h. 168.

¹³J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 130.

3. Handpone

Penggunaan alat komunikasi berupa handpone yang memiliki spesifikasi dan fitur yang dapat membantu dalam penelitian ini, utamanya aplikasi kamera foto, kamera video dan recorder suara.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Untuk membuktikan apa yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini digunakan dua metode analisis, yaitu :

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif yaitu analisis yang menggunakan masalah tidak dalam bentuk angka-angka, tetapi berkenaan dengan nilai yang didasarkan pada hasil pengolahan data dan penilaian penulis.

2. Analisis komparatif

Analisis komparatif yaitu metode yang dipergunakan untuk membandingkan data yang telah ada kemudian di tarik kesimpulan

G. Pengujian Keabsahan Data

Dalam pengujian keabsahan data tersebut dilakukan dua cara sebagai berikut :

1. Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol.¹⁴ Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak.

¹⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h. 127.

Dengan demikian dengan meningkatkan ketekunan maka, peneliti dapat memberikan deksripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Dengan melakukan hal ini, dapat meningkatkan kredibilitas data.

2. Menggunakan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara sehingga data yang didapat menjadi kredibel atau lebih cepat di percaya.¹⁵ Jadi, dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan rekaman wawancara dan foto-foto hasil observasi sebagai bahan referensi.



¹⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2004), h. 306

BAB IV

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pare-Pare

Gedung pengadilan Agama Pare-Pare pertama kali beralamat/berkantor di serambi mesjid raya Parepare (sekarang Masjid Agung Pare pare, dan gedung baru Pengadilan Agama Pare pare sejak tahun 1975 beralamat di jalan Jendral Sudirman, No. 74, kota Pare pare sesuai dengan prototype dari Mahkamah Agung RI. Adapun Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Pare pare adalah sebagai berikut:¹

1. Kondisi Geografis

Letak astronomi Kota Pare-Pare adalah 3°37'39" LS dan 119°36'24" BT adapun batasan Kota Pare-Pare adalah sebagai berikut:

- a. Utara: Kabupaten Pinrang
- b. Selatan: Kabupaten Barru
- c. Timur: Kabupaten Sidenreng Rappang
- d. Barat: Selat Makassar

2. Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Pare pare pada tahun 2017 sebanyak 132.048 jiwa, yang terdiri dari etnis Bugis, Makassar, Mandar dan Tionghoa.

¹Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare-Pare

3. Sejarah dan Dasar Hukum Pengadilan Agama Pare pare Kelas I B

Pengadilan Agama Pare pare resmi dibentuk pada tanggal 6 maret 1958 setelah diterbitkan SK/Menag/Nomor 5/1958 Tentang Pembentukan Balai Sidang Pengadilan Agama Pare-Pare dengan nama Mahkamah Syari'ah Kotamadya Pare pare yang berkantor di serambi Masjid Raya Pare pare (sekarang Masjid Agung Pare pare) di bawah pimpinan K. H. Abd. Hakim Lukman. Yuridiksinya, meliputi Kotamadya Pare pare, Kabupaten Barru, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Pinrang, dan Kabupaten Enrekang. Pada tahun 1967, keempat kabupaten tersebut masing-masing membentuk Mahkamah Syari'ah secara tersendiri. Ketua Mahkamah Syari'ah Pare pare terpilih untuk memimpin Mahkamah Syari'ah Sidrap, sehingga praktis Mahkamah Syari'ah Pare pare mengalami kekosongan pimpinan. Untuk itu dipilihlah K. H. Aqib Siangka untuk menggantikan posisinya.

Setelah berkantor di serambi Masjid selama beberapa tahun, maka pada tahun 1975 ketua yang kedua ini berinisiatif untuk mendirikan sebuah gedung tekadnya itu terwujud setelah memperoleh sebidang tanah dari PEMDA Pare pare yang terletak di jalan Harapan Sumpang (sekarang jalan Jendral Sudirman).

4. Visi dan Misi

- a. Visi Pengadilan Agama Pare pare adalah Terwujudnya Pengadilan Agama Pare Pare yang Agung.
- b. Misi mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan UU dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat.

- c. Mewujudkan peradilan yang mandiri dan independen, bebas dari campur tangan pihak lain.
- d. Memperbaiki akses pelayanan dibidang peralihan pada masyarakat.
- e. Memperbaiki kualitas input internal pada proses peradilan.
- f. Mewujudkan institusi peradilan yang efektif, efisien, dan bermartabat serta dihormati
- g. Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, tidak memihak dan transparan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, waris wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Untuk menyelesaikan tugas pokok dan wewenang tersebut Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepanitraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepangawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).

- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama islam yang dilakukan berdasarkan hukum islam sebagaimana diatur dalam pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- f. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti memberikan pertimbangan hukum agama, pelayanan riset/penelitian, pengawasan terhadap advokat/penasehat hukum dan sebagainya.
- g. Memberikan istbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal tahun hijriyah.

Disamping itu dalam rangka terwujudnya pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan Pengadilan Agama Pare pare, maka dalam melaksanakan tugas berpedoman pada SOP yang telah didiskusikan oleh bagian yang terkait dengan analisis beban kerja yang tertuang dalam Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pare pare Nomor : W2 0- A20/644.a/OT.01.3/SK/X/2015, tanggal 1 Oktober 2015 sebagai implementasi dari Undang-Undang NO.25/2009 tentang pelayanan publik yang muatannya antara lain sebagai berikut:

- a. Kejelasan proses kerja untuk setiap proses kerja
 - b. Kejelasan tugas, tanggung jawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
 - c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
 - d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
 - e. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi.
 - f. Profesionalisme personal peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.
6. Ketua Pengadilan Agama Pare pare dari tahun ke tahun:
- a. K. H. Abd. Hakim Lukman (periode 1959-1967).
 - b. K. H. Aqib Siangka (periode 1967-1980).
 - c. Drs. H. Muh. Hasan H. Muhammad (periode 1980-1986).
 - d. Drs. A. Saiful Islam Tahir (periode 1986-1993).
 - e. Drs. M. Djufri Ahmad, S. H. (periode 1993-1995).
 - f. Drs. H. M. Rasul Lily (periode 1995-1996).
 - g. K. H. Musdatsir Roci, M. A . (periode 1996-2003).
 - h. Drs. H. Alwi Thaha, S. H., M. H (pls. Ketua 2003-2004).
 - i. Drs. H. Syarif Mappiasse, S. H., M. H. (periode 2004-2005).
 - j. Drs. H. Syahrudin, S. H., M. H. (periode 2005-2010).
 - k. Drs. H. A. Siddiq, S. H., M. H. (periode 2010-2011).

- l. Drs. H. Nurdin Situju, S. H., M. H (periode 2011-2014).
- m. Drs. Haeruddin, M. H (periode 2014-2015).
- n. Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M. H (periode 2016-2017).
- o. Dra. Nur Alam syaf, S.H, M.H (periode 2017-Sekarang).

B. Prosedur Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap individu, dalam perkawinan akan terbentuk sebuah keluarga yang diharapkan akan tetap bertahan hingga pasangan tersebut dipisahkan oleh keadaan dimana salah satunya meninggal dunia.

Namun setelah menikah masalah mulai bermunculan sehingga perceraian pun menjadi salah satu pilihan yang dipertimbangkan. Perceraian sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dimasukkan sebagai salah satu alasan putusnya perkawinan selain karena kematian dan keputusan pengadilan. Dalam pasal 37, menjelaskan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Semua perkara yang diterima di Pengadilan Agama bermula dari adanya suatu sengketa antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, hal ini terjadi karena pihak yang satu dengan pihak yang lainnya merasa adanya suatu hak yang dilanggar oleh pihak lainnya sehingga salah satu pihak mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, maka pengadilan agama sesuai dengan Undang-Undang no. 7 tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo Undang-undang no. 3 tahun 2006 jo

undang-undang nomor 50 tahun 2009 pengadilan agama mempunyai kedudukan untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang masuk di Pengadilan Agama termasuk pembagian harta bersama.

Pembagian harta bersama melalui Pengadilan Agama dapat diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan perceraian (kumulatif) atau dapat pula digugat tersendiri setelah putus perceraian baik secara langsung oleh yang bersangkutan maupun memakai jasa pengacara. Pemeriksaan pembagian harta bersama dalam hal yang kumulatif dilakukan setelah pemeriksaan gugatan cerai. Apabila gugatan cerainya ditolak, maka pembagian harta bersamanya biasanya juga ditolak. Oleh karena pembagian harta bersamanya tersebut menginduk pada gugatan cerai. Kecuali kalau meminta pemisahan harta bersama, karena salah satu pihak dikhawatirkan atau bahkan terbukti menghilangkan harta bersama dengan permohonan tersendiri.²

Syarat-syarat mengajukan gugatan permohonan pembagian harta bersama ialah :

1. Mengajukan perkara atau surat gugatan ke Pengadilan Agama.
2. Penggugat mendaftarkan perkara yang akan diajukan.
3. Foto copy KTP yang menunjukkan sebagai Warga Negara Indonesia.
4. Terdapatnya harta bersama yang telah diperoleh selama perkawinan.
5. Adanya akta perceraian (apabila sudah cerai).
6. Mengajukan biaya perkara persikot atau panjar biaya perkara sewaktu surat gugatan didaftarkan dikepaniteraan.

²Wawancara dengan Dra. Fatma Abujahja, Hakim Pengadilan agama Pare-Pare pada tanggal 18 September 2017

7. Mengajukan biaya perkara setelah perkara diputus di Pengadilan.

Setelah syarat-syarat untuk mengajukan gugatan terpenuhi, maka proses pembagian harta bersama baru dapat diproses di pengadilan Agama. Bahwa pada penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama dimana penggugat mengajukan permohonan tambahan berupa permohonan sita jaminan. Sita ini dilaksanakan atas permohonan para pihak yang bersengketa artinya sita hanya dapat dilakukan jika ada permohonan, hakim tidak dapat meletakkan sita tanpa adanya permohonan, yang berhak mengajukan permohonan adalah pihak yang bersengketa itu saja, pihak ketiga tidak berhak mengajukan permohonan sita. Permohonan sita harus menyebutkan pihak-pihak dalam perkara tersebut, alasan-alasan permohonan sita, barang-barang yang dimohonkan sita dalam petitum sita.

Di dalam proses persidangan pembagian harta bersama diawali dengan proses persidangan yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa yang terjadi di persidangan sehingga hakim dapat menemukan bukti-bukti atau fakta-fakta untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama.

Pada prinsipnya proses pemeriksaan perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Para-Pare sama dengan proses pemeriksaan perkara perdata lainnya yang dilakukan di depan sidang pengadilan umum, proses pemeriksaan perkara pembagian harta bersama dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Mediasi.
2. Pembacaan gugatan,
3. Jawaban gugatan.

4. Replik penggugat,
5. Duplik tergugat.
6. Pembuktian.
7. Kesimpulan.
8. Putusan hakim.

C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembagian Harta Bersama No. 254/Pdt.G/2014/PA. Pare

Perceraian merupakan peristiwa hukum yang apabila terjadi akan menimbulkan akibat-akibat hukum pula. Akibat hukum suatu perceraian yang paling mendasar yang dirasakan oleh pasangan suami-istri salah satunya yaitu mengenai pembagian harta bersama. Tuntutan pembagian harta bersama pasti dilakukan oleh bekas suami atau istri untuk menuntut hak masing-masing dari bagian harta yang diperoleh bersama selama perkawinan berlangsung.

Harta bersama dalam perkawinan adalah seluruh harta yang diperoleh pada saat perkawinan terikat sampai perkawinan putus. Harta bersama dalam perkawinan diatur dalam perundang-undangan. Antara lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama. Salmirati, S. H mengatakakn bahwa dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama haruslah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Hukum Islam, dan Hukum Adat, atau peraturan lain yang berlaku.

Hal pokok yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah pada saat proses pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh para pihak. Dalam hal ini Hakim haruslah bisa menggali dan mengungkapkan fakta-fakta di persidangan. Antara lain *pertama*, yaitu apakah antara penggugat dengan tergugat memang benar pernah menjalin sebuah hubungan suami-isteri yang sah dan telah dinyatakan putus oleh Pengadilan karena suatu perceraian. *Kedua*, apakah Penggugat bisa membuktikan bahwa harta benda yang menjadi objek sengketa tersebut merupakan harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan berlangsung, yaitu terhitung sejak saat akad nikah sampai dengan terjadinya perceraian. Pembuktian bisa dilakukan dengan menggunakan bukti tertulis (surat), saksi, pengakuan, dan sumpah.³

Pertimbangan Hakim mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian diambil berdasarkan putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare.⁴

1. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak di persidangan, dan proses mediasi telah dilaksanakan oleh Satriani Hasyim, S.HI sebagai mediator namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya.

Pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³Wawancara dengan Salmirati, S.H, Hakim Pengadilan agama Pare-Pare pada tanggal 25 September 2017

⁴Sumber Data: Kantor Pengadilan Agama Pare-Pare

2. Bahwa yang menjadi dasar gugatan adalah penggugat mohon agar harta yang diperoleh dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat ditetapkan sebagai harta bersama selanjutnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat dengan dalil alasan sebagaimana telah diuraikan pada bahagian duduk perkara.
3. Bahwa tergugat dalam jawabannya mengakui sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan penggugat, namun pada dasarnya Tergugat enggan untuk membagi harta bersamanya dengan penggugat dengan alasan terjadinya perceraian antara penggugat dengan Tergugat karena penggugat selingkuh dengan lelaki lain, akan tetapi hal tersebut juga dibantah oleh penggugat.

Pertimbangan hakim tersebut berdasarkan pada pasal 134/311 R.Bg dan pasal 1923-1928 KUH Perdata mengemukakan bahwa pengakuan adalah keterangan sepihak dari salah satu pihak dalam satu perkara di mana ia mengakui apa-apa yang dikemukakan oleh pihak lawan.

4. Bahwa dalam pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam disebutkan “Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri atau selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selajutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun”.

Dalam Pertimbangannya, hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 Huruf (f) sebagaimana yang disebutkan di atas.

5. Bahwa berdasarkan penjelasan dalam pasal tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa harta bersama adalah harta yang di peroleh selama dalam ikatan perkawinan tanpa mempersoalkan siapa yang bekerja atau memperoleh harta tersebut baik suami maupun istri, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apapun yang menjadi penyebab perceraian karena telah berusaha memperoleh harta dalam ikatan suami istri, hal ini sesuai dengan firman Allah Swt. Dalam Surah An-Nisa' ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Terjemahnya :

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.

6. Bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dan tergugat dapat disimpulkan sebagai berikut :
- Bahwa dalil gugatan poin 1 dibenarkan oleh tergugat.
 - Bahwa dalil gugatan poin 2.a dibenarkan oleh tergugat.
 - Bahwa dalil gugatan poin 2.b dibenarkan oleh tergugat akan tetapi tergugat menyatakan rumah tersebut masih dalam proses kredit di

Bank BTN dan tergugat bayar setiap bulannya sebanyak Rp. 815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

- d. Bahwa dalil gugatan poin 2.c dibantah oleh tergugat dengan alasan mobil tersebut sudah menjadi milik orang lain karena telah dijadikan jaminan utang sebanyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada saat tergugat menjalani pendidikan perwira dengan perjanjian apabila uang tersebut tidak bisa dikembalikan berikut bunganya maka mobil toyota hardtop tersebut menjadi milik orang tersebut, dan tergugat sudah resmi cerai dengan penggugat dan sudah tidak ada ikatan perkawinan.
 - e. Bahwa dalil gugatan poin 2.e dibenarkan oleh tergugat, dan sekarang motor yamaha mio dengan nomor polisi DD 4611 LL berada dalam penguasaan anak penggugat dan tergugat.
7. Bahwa dari jawab menjawab tersebut ditemukan pokok masalah sebagai berikut :
- a. Apakah benar sebidang tanah dan bangunan diatasnya (sertifikat hak milik Nomor 1295) yang terletak di Jalan Atletik Nomor 27 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, masih dalam proses kredit di Bank BTN, dan berapa sisa utang sejak terjadinya perceraian sampai pelunasan kredit rumah tersebut ?
 - b. Apakah mobil hardtop berwarna merah dengan nomor Polisi DD 979 KH termasuk harta bersama penggugat dan tergugat dan siapa yang menguasai mobil tersebut sekarang ?

- c. Apakah mobil CRV dengan nomor Polisi B 1252 SJA dengan nomor samaran DD 89 AM termasuk harta bersama penggugat dan tergugat dan siapa yang menguasai mobil tersebut sekarang ?
8. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing baik dalil gugatan penggugat maupun dalil bantahan tergugat, maka kedua belah pihak dibebani pembuktian atas pokok masalah tersebut.
9. Bahwa sebelum pembuktian dilaksanakan peletakan sita jaminan dan pemeriksaan setempat pada tanggal 10 Desember 2014, di jalan Abd. Rasyid Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki barat, dan di jalan Atletik.
10. Bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat harta-harta objek sengketa yang ditemukan adalah sebagai berikut:
- a. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 21 dengan luas bangunan 189 m² tercatat atas nama penggugat yang telah dihibahkan kepada ketiga anak dibeli pada tahun 2010, terletak di jalan Abd. Rasyid No. 26 (lorong masuk permandian Lumpue), RT 002/RW 005 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah atas nama Puang Sitti Reyana
 - Sebelah Selatan : Rumah atas nama Nenny
 - Sebelah Timur : Rumah atas nama Ijapang
 - Sebelah Barat : Tanah Kosong

Yang di dalamnya terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga terdiri dari :

- 1) 3 (tiga) unit sofa berwarna hitam
 - a) 1 (satu) set sofa berwarna hitam
 - b) 1 (satu) set kursi tamu
 - c) 1 (satu) set kursi teras
- 2) 3 (tiga) unit tempat tidur beserta spring bed
- 3) 4 (empat) unit lemari pakaian
- 4) 1 (satu) set kursi makan
- 5) 2 (dua) unit lemari pecah belah
- 6) 1 (satu) unit mesin cuci merk LG
- 7) 1 (satu) unit Kulkas 2 pintu merk LG
- 8) 4 (empat) buah unit AC yang terdiri dari :
 - a) 1 (satu) unit AC merk LG
 - b) 1 (satu) unit AC merk LG
 - c) 1 (satu) unit AC merk LG
 - d) 1 (satu) unit AC merk LG
- 9) 2 (dua) unit kompor gas beserta 2 (dua) unit tabung gas dengan kapasitas 13 kg yang terdiri dari:
 - a) 1 (satu) unit kompor gas merk Butterfly
 - b) 1 (satu) unit kompor gas merk Quantum
- 10) 1 (satu) lukisan kaligrafi/Al-Qur'an
- 11) 2 (dua) karpet besar

12) 2 (dua) kerpet kecil

13) 1 (satu) unit peralatan olahraga treadmill merk Shaga

- b. 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan di atasnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1295 dengan luas bangunan 104 m² yang sekarang menjadi jaminan di Bank BTN Pare-pare, terletak di jalan Atletik No. 27 Parepare, Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung Kota Pare-pare dibeli pada tahun 2004, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah atas nama Puang Rimbas
- Sebelah Timur : Rumah atas nama puang Rahman Mappile
- Sebelah Selatan : Rumah atas nama A.Pangurisang
- Sebelah Barat : Jalanan Perumahan

Yang didalamnya terdapat berbagai macam perabotan rumah tangga terdiri dari:

- a) 1 (satu) set kursi tamu
- b) 1 (satu) set kursi makan
- c) 2 (dua) unit tempat tidur
- d) 1 (satu) set lemari dapur
- e) 3 (tiga) unit AC yaitu:

1) 1 (satu) unit AC merk Panasonic

2) 2 (dua) unit AC merk LG

11. Bahwa atas harta-harta yang ditemukan pada pemeriksaan setempat tersebut telah diletakkan sita jaminan oleh Panitera Pengadilan Agama Pare-pare.

pertimbangan hakim tersebut sudah sesuai dengan hukum acara yakni melakukan sita jaminan untuk menjamin gugatan penggugat tidak *illusoir* (hampa) pada saat putusan nanti memperoleh kekuatan hukum tetap.

12. Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi.

13. bukti P adalah fotokopi Akta Cerai yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pare-pare, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat yang membuktikan bahwa antara penggugat dan tergugat pernah hidup bersama sebagai suami istri dan telah bercerai di Pengadilan Agama Pare-pare.

14. Bahwa kedua saksi penggugat telah menghadap di persidangan, bersumpah dan memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil,

15. Bahwa saksi pertama Penggugat adalah kakak kandung penggugat dan saksi kedua adalah kakek penggugat yang pengetahuannya hanya mengenai fakta yang sudah terbukti yaitu adanya 2 unit rumah yang terletak di jalan Abd. Rasyid (Lumpue) dan jalan Atletik Kota Parepare, kedua saksi tersebut mengetahui adanya mobil hardtop akan tetapi tidak mengetahui permasalahannya dan dimana mobil tersebut sekarang berada,

dan juga mengetahui ada mobil CVR akan tetapi tidak mengetahui secara pasti kapan mobil tersebut dibeli, hanya diketahui dibeli sebelum penggugat dan tergugat bercerai seperti dalil penggugat.

16. Bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi penggugat tidak dapat menjawab pokok masalah maka kesaksiannya tidak mampu membuktikan dalil-dalil penggugat yang dibantah oleh tergugat.
17. Bahwa tergugat juga telah mengajukan bukti surat (bukti T.1 sampai dengan T.11 dan 3 orang saksi.
18. Bahwa bukti T.1 adalah fotokopi sertifikat hak milik atas tanah di jalan Abd. Rasyid (Lumpue), Kota Parepare dan bukti T.2 adalah fotokopi akta hibah atas tanah tersebut serta bangunan di atasnya (vide gugatan Penggugat poin 2.a), kedua bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Kedua bukti tersebut merupakan bukti autentik, sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah.
19. bahwa bukti T.3 adalah fotokopi Surat Perjanjian mengenai pinjaman uang dengan jaminan mobil toyota hardtop warna merah Nomor Polisi DD 979 KH milik pihak pertama. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan materai cukup namun dibantah oleh penggugat dengan alasan penggugat tidak pernah mengetahui adanya perjanjian dan utang tergugat tersebut, maka bukti T.3 hanya dapat diterima sebagai bukti awal.
20. Bahwa bukti T.4 adalah fotokopi kwitansi pembelian mobil honda CRV warna abu-abu metelik dengan nomor Polisi B 1252 SJA bertanggal 18 Desember 2013. fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan

bermaterai cukup, akan tetapi dibantah oleh penggugat dengan alasan mobil tersebut sudah ada sebelum penggugat dan tergugat bercerai, maka bukti T.4 tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti awal.

21. Bahwa bukti T.5 dan T.6 adalah fotokopi salinan rekening koran KPR atas tanah dan bangunan (vide gugatan penggugat poin 2.b) Nomor Rekening : 00004-01-013604-7 atas nama Bakri, dan T.7 adalah fotokopi rincian pelunasan dipercepat atas rekening tersebut. Ketiga fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup serta tidak dibantah oleh penggugat, maka bukti T.5, T.6 dan T.7 dapat diterima sebagai bukti yang sah.
22. Bahwa bukti T.8 adalah fotokopi kwitansi atas pembelian mobil toyota avanza G nomor Polisi DD 763 II bertanggal 18 Juli 2014, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup. Bukti T.8 tersebut terkait dengan bukti T.3 sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti.
23. Bahwa T.9 adalah fotokopi bukti serah terima barang/kendaraan honda CRV warna abu-abu metalik Noor Polisi B.1252 SJA dari Iqbal Ke H. Hamzah (Sumber agung Motor) bertanggal 25 Oktober 2013, bukti T.10 adalah fotokopi Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah atas mobil honda CRV tersebut dan bukti T.11 adalah fotokopi Surat Keterangan pindah pengganti STNK atas mobil honda CRV tersebut, ketiga fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti terkait dengan bukti T.4.

24. Bahwa Tergugat telah menghadirkan pula 3 orang saksi yang tidak terlarang menjadi saksi, telah menghadap di persidangan serta memberikan keterangan di bawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri sehingga ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.
25. Bahwa saksi pertama tergugat menerangkan bahwa penggugat dan tergugat datang ke kantor saksi untuk membuat Akta Hibah atas tanah dan bangunan yang terletak di jalan abd. Rasyid No. 26 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare untuk pengalihan tanah dan bangunan tersebut kepada ketiga anak penggugat dan tergugat.
26. Bahwa keterangan saksi pertama tersebut relevan dengan dalil penggugat, jawaban tergugat dan bukti T.2 yang membuktikan bahwa harta berupa tanah dan bangunan serta seluruh isinya (vide gugatan poin 2.a) telah dihibahkan kepada ketiga anak penggugat dan tergugat.
27. Bahwa saksi kedua tergugat adalah saudara kandung tergugat yang menerangkan bahwa saksi yang pernah meminjamkan uang kepada tergugat sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus juta rupiah) dengan jaminan Mobil Hardtop warna merah Nomor Polisi DD 979 KH, akan tetapi sudah ditebus oleh tergugat dengan uang sejumlah Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 21 Oktober 2013.
28. Bahwa keterangan saksi kedua tersebut dengan penjelasan tergugat membuktikan bahwa Mobil Hardtop (vide gugatan poin 2.c) adalah harta

bersama yang dijaminkan oleh tergugat kemudian ditebus oleh tergugat dan sekarang mobil tersebut berada dalam penguasaan tergugat.

29. Bahwa saksi ketiga tergugat menerangkan bahwa tergugat membeli mobil honda CRV pada tanggal 18 Desember 2013 dari Showroom Sumber Agung dan saksi yang mengantar mobil tersebut kepada tergugat.

30. Bahwa keterangan saksi ketiga tersebut relevan dengan dalil tergugat dan bukti T.4, bahwa mobil honda CRV dibeli oleh tergugat setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat.

31. Bahwa dari bukti-bukti tergugat telah terjawab pokok masalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di jalan Atletik Nomor 27 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Parepare (vide gugatan poin 2.b) benar masih dalam proses kredit di Bank BTN, berdasarkan bukti T.5 sisa utang pada saat terjadinya perceraian per tanggal 5 Desember 2013 adalah Rp. 13.206.613.00 (tiga belas juta dua ratus enam ribu enam ratus tiga belas rupiah) sebagian sudah dibayar oleh tergugat, dan sisa utang yang belum dibayar saat ini berdasarkan bukti T.7 adalah Rp. 10.624.307,00 (sepuluh juta enam ratus dua puluh empat ribu tiga ratus tujuh rupiah).
- b. Bahwa mobil toyota harddtop warna merah nomor Polisi DD 979 KH (vide gugatan 2.c) diakui sebagai harta bersama, pernah dijadikan jaminan utang oleh tergugat akan tetapi sudah ditebus oleh tergugat dan sekarang mobil tersebut berada dalam penguasaan tergugat

berdasarkan bukti T.3 dikuatkan dengan saksi kedua tergugat dan keterangan tergugat.

- c. Bahwa mobil honda CRV nomor Polisi B 1252 SJA dengan nomor samaran DD 89 AM (vide gugatan 2.d) tidak termasuk harta bersama karena dibeli pada tanggal 18 Desember 2013 setelah terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat berdasarkan bukti T.4 dan keterangan saksi ketiga tergugat.

Pertimbangan hakim di atas sesuai dengan Pasal 164 HIR/284 RBg, 1866 KUH Perdata tentang alat bukti yang terdiri dari alat bukti tertulis (surat) dan alat bukti saksi.

32. Bahwa harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya (pasal 91 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam), dan suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama (pasal 92 Kompilasi Hukum Islam),

33. Bahwa Berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat, jawaban tergugat dan bukti-bukti maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa sebidang tanah dan bangunan di Jalan Abdul Rasyid No. 26 RT.002/RW.005 Kelurahan Lumpue, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Pare-pare dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah atas nama Puang Sitti Reyyana

Sebelah Timur : Rumah atas nama Ijapani

Sebelah Selatan : Rumah atas nama Nenny

Sebelah Barat : Lorong

Beserta seluruh isinya tidak termasuk harta bersama penggugat dan tergugat karena telah dihibahkan kepada ketiga anak penggugat dan tergugat.

- b. Bahwa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Atletik No. 27 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Rumah atas nama Rimbas

Sebelah Timur : Rumah atas nama Rahman Mappile

Sebelah Selatan : Rumah atas nama A. Pangsirang

Sebelah Barat : Jalanan perumahan

beserta isinya berupa :

- 1). 1 set kursi tamu
- 2). 1 set kursi makan
- 3). 2 unit tempat tidur
- 4). 1 unit lemari dapur
- 5). 3 unit AC

Adalah harta bersama penggugat dan tergugat.

- c. Bahwa atas tanah dan bangunan tersebut masih ada sisa kredit pada bank BTN sejumlah Rp. 13.206.613,00 terhitung sejak terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat, utang tersebut adalah utang bersama penggugat dan tergugat.

- d. Bahwa mobil toyota Hardtop warna merah nomor Polisi DD 979 KH adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
 - e. Bahwa mobil honda CRV warna Abu-abu metalik nomor Polisi B 1252 SJA tidak termasuk harta bersama penggugat dan tergugat.
 - f. Bahwa motor yamaha mio dengan nomor Polisi DD 4611 LL adalah harta bersama penggugat dan tergugat.
34. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis Hakim berkesimpulan bahwa harta-harta bersama penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :
- a. sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Atletik No. 27 Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan Ujung, Kota Pare-pare dengan isinya berupa :
 - 1). 1 set kursi tamu
 - 2). 1 set kursi makan
 - 3). 2 unit tempat tidur
 - 4). 1 unit lemari dapur
 - 5). 3 unit AC
 - b. Satu unit mobil toyota Hardtop warna merah nomor Polisi DD 979 KH.
 - c. Satu Unit Motor yamaha mio nomor Polisi DD 4611 LL.
35. Bahwa harta bersama poin 1 dan 2 dikuasi oleh tergugat sedangkan harta bersama poin 3 dikuasai oleh penggugat,
36. bahwa berdasarjan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian, tidak menerima dan menolak untuk selain dan sebaliknya.

37. Bahwa penggugat dan tergugat berhak mendapatkan harta bersama tersebut masing-masing seperdua bagian berdasarkan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pertimbngannya, Hakim mengacu pada Kompilasi Hukum Islam pasal 97 yang berbunyi janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

38. Bahwa sisa kredit pada Bank BTN sejak terjadinya perceraian antara penggugat dan tergugat atas harta bersama poin 1 sejumlah RP. 13.206.613,00 adalah utang bersama penggugat dan tergugat.

39. Bahwa penggugat dan tergugat berkewajiban membayar utang tersebut secara bersama-sama masing-masing seperdua.

Dalam rekonvensi

40. Bahwa penggugat dalam rekonvensinya menuntut harta berupa uang yang sudah dibelanjakan untuk keperluan keluarga selama masih dalam ikatan suami isteri serta harta-harta yang tidak berada dalam penguasaan tergugat karena itu gugatan penggugat tidak beralasan dan tidak jelas.

41. Bahwa gugatan rekonvensi penggugat tidak disusun sesuai dengan format gugatan rekonvensi.

42. Bahwa oleh kerana gugatan penggugat tidak beralasan dan tidak jelas atau kabur, maka gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

Dalam konvensi dan rekonvensi

43. Bahwa oleh karena dalam perkara harta bersama tidak ada menang dan kalah karena masing-masing pihak memperoleh seperdua bagian, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat dan tergugat secara tanggung renteng.
44. Memperhatikan segala ketentuan Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

Menurut penulis, hakim dalam pertimbangannya sudah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam mengambil keputusan sehingga memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara.

D. Analisis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian

Sengketa harta bersama oleh orang beragama Islam harus diselesaikan di Pengadilan Agama sesuai dengan kewenangan absolut yang tertuang di dalam pasal 49 ayat (1) Undang-undang No.7 tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah beberapa kali diamandemen. Sengketa harta bersama merupakan masalah yang cukup rumit kerana berkaitan dengan harta benda suami istri yang meminta bagian masing-masing ketika terjadi perceraian.

Sengketa harta bersama yang berakhir dengan putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare berawal dari gugatan penggugat yang meminta pembagian harta bersama. Dengan di tetapkan sebagai harta bersama tentunya harta-harta tersebut akan dibagi dua antara penggugat dan tergugat. Sesuai dengan konsep pembagian harta bersama yang telah diatur dalam pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Sehingga apabila terjadi perceraian dan terjadi pembagian harta bersama dapat dibagi sesuai dengan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan wawancara dengan hakim di Pengadilan Agama Pare-Pare bahwa dalam menyelesaikan sengketa pembagian harta bersama ini mejelis hakim merujuk kepada Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.

Dalam putusan perkara No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare hakim telah berusaha memberikan keadilan dalam hal pembagian harta bersama. Hal ini sudah cukup memberi keadilan bagi penggugat dan tergugat dalam perkara tersebut, harta bersama dibagi seperdua bagian untuk masing-masing pihak berdasarkan keterangan saksi-saksi beserta bukti yang ada. Menurut penulis, Majelis hakim dalam memutus perkara tersebut sudah sesuai dengan Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyelesaian pembagian harta bersama dilakukan berdasarkan Hukum Acara Peradilan Agama yang telah ditentukan, baik secara hukum formil maupun hukum materil. Di dalam proses persidangan pembagian harta bersama diawali dengan proses persidangan yang dapat memberikan suatu gambaran yang jelas terhadap suatu peristiwa yang terjadi di persidangan sehingga hakim dapat menemukan bukti-bukti atau fakta-fakta untuk dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan dalam pelaksanaan pembagian harta bersama.
2. Ada beberapa hal yang dapat dijadikan pertimbangan oleh Hakim sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama haruslah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini, pertimbangan Hakim pada putusan nomor 254/Pdt.G/2014/PA.Pare adalah Hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian berdasarkan bukti-bukti yang ada dan keterangan saksi.

B. Implikasi Penelitian

1. Dalam menyelesaikan pembagian harta bersama Hakim di Pengadilan Agama Pare-Pare yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan pembagian harta bersama akibat dari perceraian, harus cermat dan teliti dalam memeriksa perkara tersebut. Sehingga dalam proses pembuktian

dipersidangan Majelis Hakim dapat melihat apakah penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya atau tidak. Jika memang Penggugat bisa membuktikan dalil gugatannya maka majelis Hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

2. Pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Untuk itu hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat maupun saksi-saksi. Sehingga keputusan yang akan dijatuhkan dapat didasari oleh rasa tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan, profesionalisme, dan bersifat obyektif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearsah Ragam Varian Kontemporer*. Cet. 10; Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Cet. 4; Jakarta: Rajawali Pers, 2014.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Cet. III; Jakarta: Kencana, 2008.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cet. 1; Bandung: Mandar Maju, 1990.

Harahap, Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Cet. I; Jakarta : Pustaka Kartini, 1990.

Ramulyo, Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

Idrus, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Cet. I; Yogyakarta : Erlangga, 2009.

Latif, Djamil. *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Manan, Abdul dan M. Fauzan. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*. Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001).

Manan, Abdul. *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*. Cet. 2; Jakarta: Kencana, 2008.

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2016.

Moleong, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. 13; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Balai Pustaka, 1993.

Prakoso, Djoko dan Murtika I Ketut. *Asas-asas Hukum Perkawinan di Indonesia*. Cet. I; Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.

Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Cet. 4; Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000.

- Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Cet. 3; Bandung: PT Citra Aditya Bakti 1993.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2004.
- Susanto. Happy, *Pembagian Harta Gono-Gini*. Cet. 1; Jakarta: Visimedia, 2008.
- Thalib, Suyuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Cet. 1; Jakarta: Yayasan Penerbit UI, 1974).
- Tihami dan Sahrani Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Cet. II; Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. VII Bandung: Citra Umbara, 2011.
- Warjiyati, Sri dan Bahder Johan Nasution. *Hukum Perdata Islam*. Cet. I; Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Pendidikan, Teori-Aplikasi*. Cet. 3; Jakarta: PT Bumi Aksra, 2009.

PERSETUJUAN PEMBIMBING/PENGUJI

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare (Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare)”, yang disusun oleh Muhammad Faiz, NIM: 10100113081, Mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar hasil yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 23 November 2017 M, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1439 H, dinyatakan telah diperiksa secara seksama, diteliti, dan disetujui untuk dimunaqasyahkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 24 November 2017 M

5 Rabiul Awal 1439 H

Penguji I	: Drs. Hadi Daeng Mapuna, M.Ag.	(.....)
Penguji II	: Dr. Hj. Patimah, M.Ag.	(.....)
Pembimbing I	: Dra. Hj. Hartini, M.H.I.	(.....)
Pembimbing II	: Musyfikah Ilyas, S.H.I, M.H.I.	(.....)

Disetujui oleh:
Ketua Jurusan Peradilan

Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare (Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare)”, yang disusun oleh Muhammad Faiz, NIM: 10100113081, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah melaksanakan penelitian, diteliti dan dikoreksi secara saksama serta disetujui untuk diseminarkan (seminar hasil).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 16 November 2017 M
27 Safar 1439 H

Pembimbing I

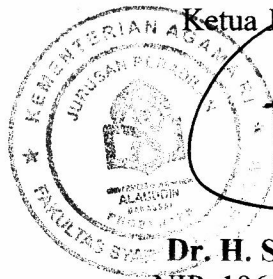
Dra. Hj. Hartini, M.H.I.
NIP. 195706271991032001

Pembimbing II

Musyifah Ilyas, S.H.I, M.H.I.
NIP. 198218012014112002

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



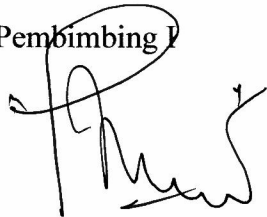
Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003

PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare (Studi Putusan No.254/Pdt.G/2014/PA.Pare”, yang disusun oleh Muhammad Faiz, NIM: 10100113081, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam seminar proposal Skripsi yang diselenggarakan pada hari Jum’at tanggal 18 Agustus 2017 M, bertepatan dengan 20 Dzulqaidah 1438 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan penelitian (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 25 Agustus 2017 M
27 Dzulqaidah 1438 H

Pembimbing I



Dra. Hj. Hartini, M.H.I.
NIP. 195706271991032001

Pembimbing II



Musyfikah Ilyas, S.H.I, M.H.I.
NIP. 198218012014112002

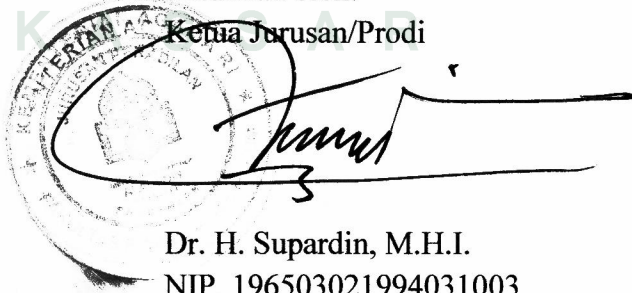
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

M A K A S S A R

Disahkan oleh:

Ketua Jurusan/Prodi



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Proposal skripsi yang berjudul, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama Pare-Pare (Studi Putusan No.254/Pdt.G/2014/PA.Pare)”, yang disusun oleh Muhammad Faiz, NIM: 10100113081, mahasiswa Prodi Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan, Jurusan Peradilan pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, telah diteliti dan dikoreksi secara seksama serta disetujui untuk diseminarkan (Seminar Proposal).

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.

Makassar, 03 Agustus 2017 M
05 Dzulqaidah 1438 H

Pembimbing I


Dra. Hj. Hartini, M.H.I.
NIP. 1195706271991032001

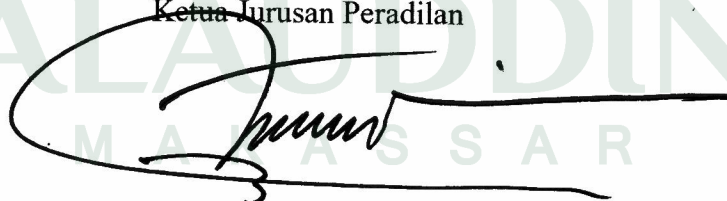
Pembimbing II


Musyfikah Ilyas, S.H.I, M.H.I.
NIP. 198218012014112002

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Disetujui oleh:

Ketua Jurusan Peradilan



Dr. H. Supardin, M.H.I.
NIP. 196503021994031003



PENGADILAN AGAMA PAREPARE KELAS I B

Website : www.pa-parepare.go.id, email : info@pa-parepare.go.id
Jalan Jenderal Sudirman No. 74 Telp. 0421-21458, Fax. 0421-27567 Parepare

Nomor : W20-A20/915 /PB.02/X/2017 Parepare, 17 Oktober 2017

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian

Kepada yth

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Assalamu Alaikum wr. wb

Berdasarkan Surat Saudara Nomor: SI. I/PP.00.9/2391/2017 tanggal 29 Agustus 2017 tentang perihal Permohonan Izin Penelitian pada Pengadilan Agama Parepare maka dengan ini kami menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Faiz
Nim : 10100113081
Jenis kelamin : Laki-laki
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Acara Peradilan & Kekeluargaan
Semester : IX (sembilan)
Alamat : JL. Veteran Bakung, BTN Zarindah Permai Blok Q/5, Gowa.

maka dengan ini di sampaikan kepada saudara bahwa pada dasarnya mahasiswa tersebut Telah melakukan penelitian/wawancara di Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 11 September s/d 11 Oktober 2017.

Demikian disampaikan untuk di ketahui, terima kasih.

Wassalam

Ketua



Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.
NIP. 19670730 199303 2 006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN YURIDIS PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA PARE-PARE (Studi Putusan No. 254/Pdt.G/2014/PA.Pare)”**

bernama lengkap Muhammad Faiz, Nim : 10100113081, Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Drs.

Abd. Rahim Gaffar dan Ibu Dra. Marham yang lahir pada tanggal 04 Maret 1995 di Pare-Pare, Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di Sekolah Dasar SDN Centere Mangkoso Kabupaten Barru pada tahun 2002-2007 Sampai Penulis menempuh pendidikan di SMP DDI Mangkoso Kabupaten Barru di tahun 2007-2010, dengan tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikannya di MAN 2 Barru Kabupaten Barru tahun 2010-2013. Dengan tahun yang sama yakni tahun 2013, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar dan lulus di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Peradilan Agama hingga tahun 2017.

Selama menyandang status mahasiswa di jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah dan Hukum, penulis pernah menjadi Pengurus Dema Syariah dan Hukum Periode 2014-2015 dan Pengurus Sema Syariah dan Hukum Periode 2015-2016